EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELUARAN KAS DAERAH

(STUDI KASUS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN)

RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

HASNA MUTIA DEWI

3118 30645

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA

FEBRUARI 2021

SKRIPSI

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELUARAN KAS DAERAH

(STUDI KASUS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

HASNA MUTIA DEWI

No Induk Mahasiswa: 311830645

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 8 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing	Penguji
Deden Iwan Kusuma, Drs., M.Si., Ak.	Theresia Trisanti, Dr., MBA., Ak.

Yogyakarta, 8 Februari 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua

Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

Dipindai dengan CamScanner

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELUARAN KAS DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN)

Hasna Mutia Dewi

311830645

Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman apakah sudah sesuai atau belum dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No 21 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Sleman No 54.1 Tahun 2017. Sistem informasi akuntansi meliputi prosedur pengeluaran kas daerah, dokumen yang digunakan, pihak yang berkaitan serta pengendalian internal yang diterapkan. Penelitian ini mengambil data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi secara langsung pada dinas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi pengeluaran kas daerah di BKAD Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Permendagri No 21 Tahun 2011 dan Perbup Sleman No 54.1 Tahun 2017. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan prosedur yang sudah berjalan dengan semestinya, dokumen yang digunakan sudah sesuai, pihak berkaitan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya, hanya saja pengendalian internal di BKAD Kabupaten Sleman perlu ditingkatkan agar tercipta sistem yang lebih baik.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Kas Daerah.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang berlandaskan pada asas pelayanan publik yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, persamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban untuk mencapai *good governance*. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga dalam penyusunannya membutuhkan sistem akuntansi yang baik dan teknologi informasi yang mumpuni.

Akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diantaranya pencatatan atas pendapatan, belanja, aset dan selain kas sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kas adalah salah satu unsur dalam laporan keuangan. Kas mencakup uang tunai dan deposit di bank yang dipakai dalam operasional pemerintahan daerah. Kas adalah aktiva paling likuid yang berarti sering berubah serta komponen paling penting dalam pelaksanaan aktivitas operasional yang sangat rentan adanya kecurangan dan mengakibatkan kerugian terhadap kas daerah (Longdong, 2013). Pengeluaran kas merupakan komponen penting dalam pelaksanaan program pembangunan pemerintah yang harus dijalankan dengan efektif dan efisien untuk menghindari terjadinya pengeluaran yang berlebihan. Pengeluaran kas sangat mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kas Daerah digunakan untuk berbagai macam pembayaran dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Untuk mengantisipasi penyelewengan dan meningkatkan pengawasan maka disusun prosedur pengelolaan kas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 atau sekarang menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perihal Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Instansi daerah yang mengelola keuangan daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BKAD mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan dan pemeliharaan terhadap aset daerah sehingga anggaran daerah dapat digunakan untuk menjalankan program yang dirancang oleh pemerintah daerah. BKAD Kabupaten Sleman merupakan instansi daerah yang salah satu tugasnya melakukan proses pencairan dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran. Dalam menjalankan tugasnya BKAD Kabupaten Sleman berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Sleman No 54.1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 dan Perbup Sleman No 54.1 Tahun 2017?"

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengolah data maupun transaksi untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk merencanakan, mengontrol serta melaksanakan suatu kegiatan ekonomi. Di dalam sistem informasi akuntansi terdapat tugas-tugas yang harus dilaksanakan, diantaranya mengumpulkan transaksi, menginput ke sistem, mengolah, menyimpan data dan mengendalikan seluruh proses hingga mendapatkan informasi berupa laporan yang valid dan *reliable*.

Akuntansi Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah mencakup rangkaian prosedur, seperti pengumpulan data, pencatatan, pengklasifikasian, dan pernyataan atas transaksi serta menyusun laporan

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

keuangan untuk pertanggungjawaban APBD baik dilaksanakan secara manual maupun menggunakan komputer.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Seperti yang tertera pada Permendagri No 21 Tahun 2011, pengelolaan keuangan daerah merupakan aktivitas berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengendalian keuangan daerah. Dana yang keluar dari kas daerah selama periode tahun anggaran dicatat pada saat pengeluaran kas terjadi. Pengukuran pengeluaran daerah menggunakan basis nominal, yaitu dicatat sebesar nominal kas yang dikeluarkan pada saat terjadi pengeluaran. Sistem akuntansi pengeluaran daerah diklasifikasikan menjadi 4 subsistem yaitu, Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), Belanja Langsung (LS).

Prosedur Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Daerah, terdiri dari:

a. Penerbitan Surat Penyedia Dana (SPD)
b. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
c. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
d. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
e. Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
f. Penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD)

Tabel 1.1
Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Daerah

No	Prosedur	Bagian Terkait	Dokumen (Input)	Dokumen (Output)
1	Penyusunan Surat Penyedia Dana (SPD)	– Kuasa BUD – PPKD – Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran	– Anggaran Kas – DPA-SKPD	SPD
2	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk	– Bendahara pengeluaran – PPK-SKPD	– Surat Pengantar SPP – Ringkasan SPP	SPP yang akan diajukan kepada Kepala Dinas

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No	Prosedur	Bagian Terkait	Dokumen (Input)	Dokumen (Output)
	Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS).	– PPTK	– Rincian SPP – Salinan SPD – Surat pernyataan – Surat keterangan SPP-TU – Lampiran SPP-LS	
3	Penerbitan SPM, baik untuk UP,GU,TU maupun LS.	– PPK-SKPD – Pengguna Anggaran	– Register SPM – Register surat penolakan SPM	SPM untuk disahkan oleh Kepala Dinas
4	Pembuatan SP2D.	– Kuasa BUD – Pengguna Anggaran – Bendahara Pengeluaran	– Register SP2D – Surat penolakan SP2D – Register penolakan SP2D – Buku kas pengeluaran	Dokumen SP2D untuk pencairan dana.
5	Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran	– Bendahara pengeluaran – PPK-SKPD – Pengguna anggaran	– SPJ Pengeluaran – Register penerimaan – Laporan pertanggungjawaban pengeluaran – Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran – Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran.	LPJ Bendahara Pengeluaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD

Sumber : Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan SE BAKD No 900/316/BAKD.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

OBJEK PENELITIAN

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Sekretariat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang beralamatkan di Jl Parasamya No 05, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511. Telp/Fax (0274) 866039. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Januari tahun 2021.

MODEL PENELITIAN

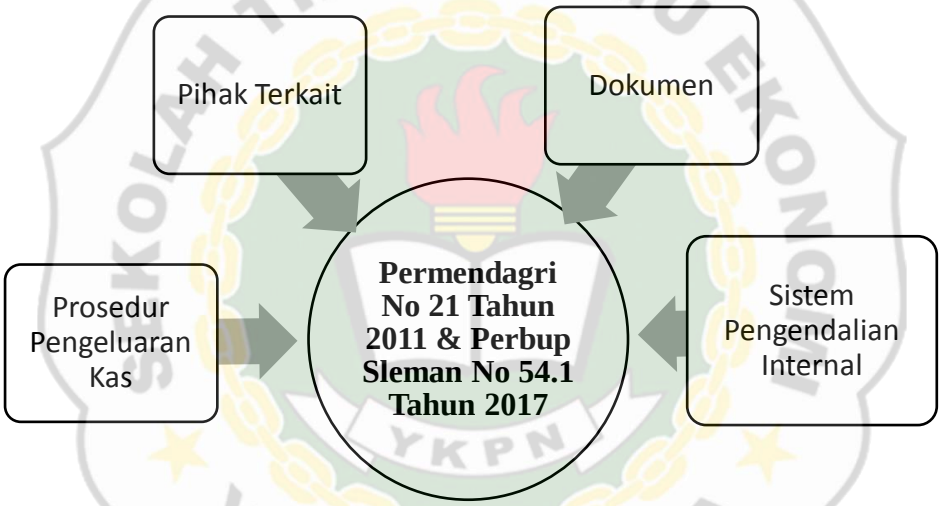

Gambar 1.1 Model Penelitian

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

SUMBER DATA

a. Data Primer

Data primer didapatkan dari hasil wawancara baik secara langsung maupun percakapan melalui aplikasi WhatsApp dengan Bagian Keuangan di Sekretariat pada BKAD Kabupaten Sleman. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara terkait dengan Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Daerah di BKAD Kabupaten Sleman. Data Primer juga didapatkan dari observasi langsung ke BKAD

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kabupaten Sleman seperti melihat proses input data ke aplikasi SIADINDA, melihat proses alur dokumen pengeluaran kas daerah.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup Permendagri No 21 Tahun 2011, Perbup Sleman No 54.1 Tahun 2017, literatur, jurnal ilmiah dengan topik yang sama sebagai referensi penelitian terdahulu, artikel, hasil tangkapan layar aplikasi maupun *worksheet* dan contoh dokumen pengeluaran kas yang digunakan BKAD Kabupaten Sleman.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi tertentu. Peneliti melakukan komunikasi dengan bagian terkait pengeluaran kas, yaitu bendahara pengeluaran di Sekretariat BKAD Kabupaten Sleman. Wawancara dilakukan secara langsung di Kantor BKAD Kabupaten Sleman dan melalui WhatsApp. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Sistem Pengeluaran Kas Daerah di BKAD Kabupaten Sleman. Daftar pertanyaan wawancara akan dilampirkan pada skripsi ini.

b. Observasi

Observasi merupakan aktivitas berupa pengamatan pada suatu objek secara langsung dan mendetail guna mendapatkan informasi tentang objek tersebut. Peneliti melakukan peninjauan langsung ke BKAD Kabupaten Sleman guna memperoleh data yang dibutuhkan. Observasi berupa melihat secara langsung proses input data pada aplikasi SIADINDA, melihat proses alur dokumen serta pendistribusian kepada pengguuna output dan format dokumen terkait.

c. Studi Kepustakaan

Penelitian ini didukung dengan studi kepustakaan seperti mempelajari buku atau literatur mengenai sistem informasi akuntansi, akuntansi keuangan daerah, artikel, jurnal penelitian dengan topik yang sama dengan skripsi peneliti, Peraturan yang

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berkaitan seperti Permendagri No 21 Tahun 2011 dan Perbup Sleman No 54.1 Tahun 2017 serta situs internet yang berhubungan dengan sistem pengeluaran kas SKPD.

d. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen dengan *copy* berkas yang berkaitan dengan bahan penelitian berupa catatan di lapangan, mencakup nota dan formulir dokumen yang berhubungan dengan sistem akuntansi pengeluaran kas daerah di BKAD Kabupaten Sleman seperti DPA SKPD, SPD, SPP, SPM, SP2D, SPJ dan dokumen pendukung lainnya seperti surat pernyataan, rincian penggunaan anggaran, ringkasan dana.

METODE DAN TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian ini menganalisis mengenai sistem pengeluaran kas pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dengan menggunakan data kualitatif. Menurut Sugiyono (2015), analisis data kualitatif dilakukan dengan empat aktivitas meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan. Kegiatan tersebut merupakan siklus dan saling berinteraksi.

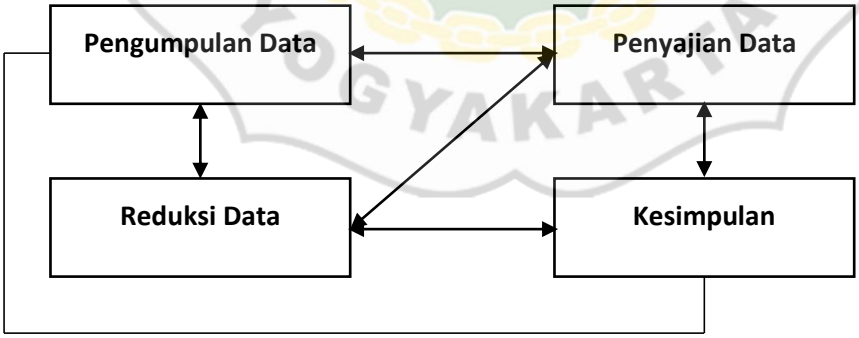

Gambar 1.2 Skema Analisis Data Kualitatif (Interactive Model) Miles dan Huberman
Sumber: Sugiyono (2015)

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PEMBAHASAN

Prosedur Pengeluaran Kas pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

a. Prosedur Surat Penyediaan Dana

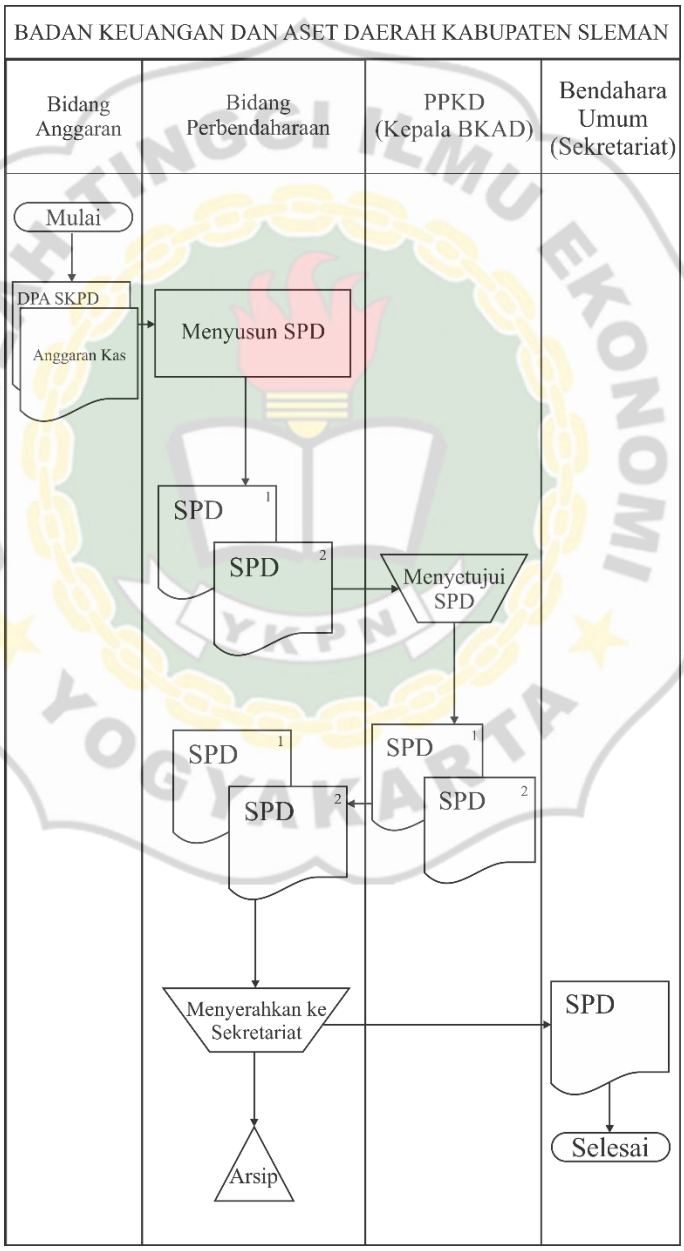

Gambar 1.3 Bagan Alir Surat Penyedia Dana (SPD)
Sumber: Diolah Oleh Peneliti

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b. Prosedur Uang Persediaan

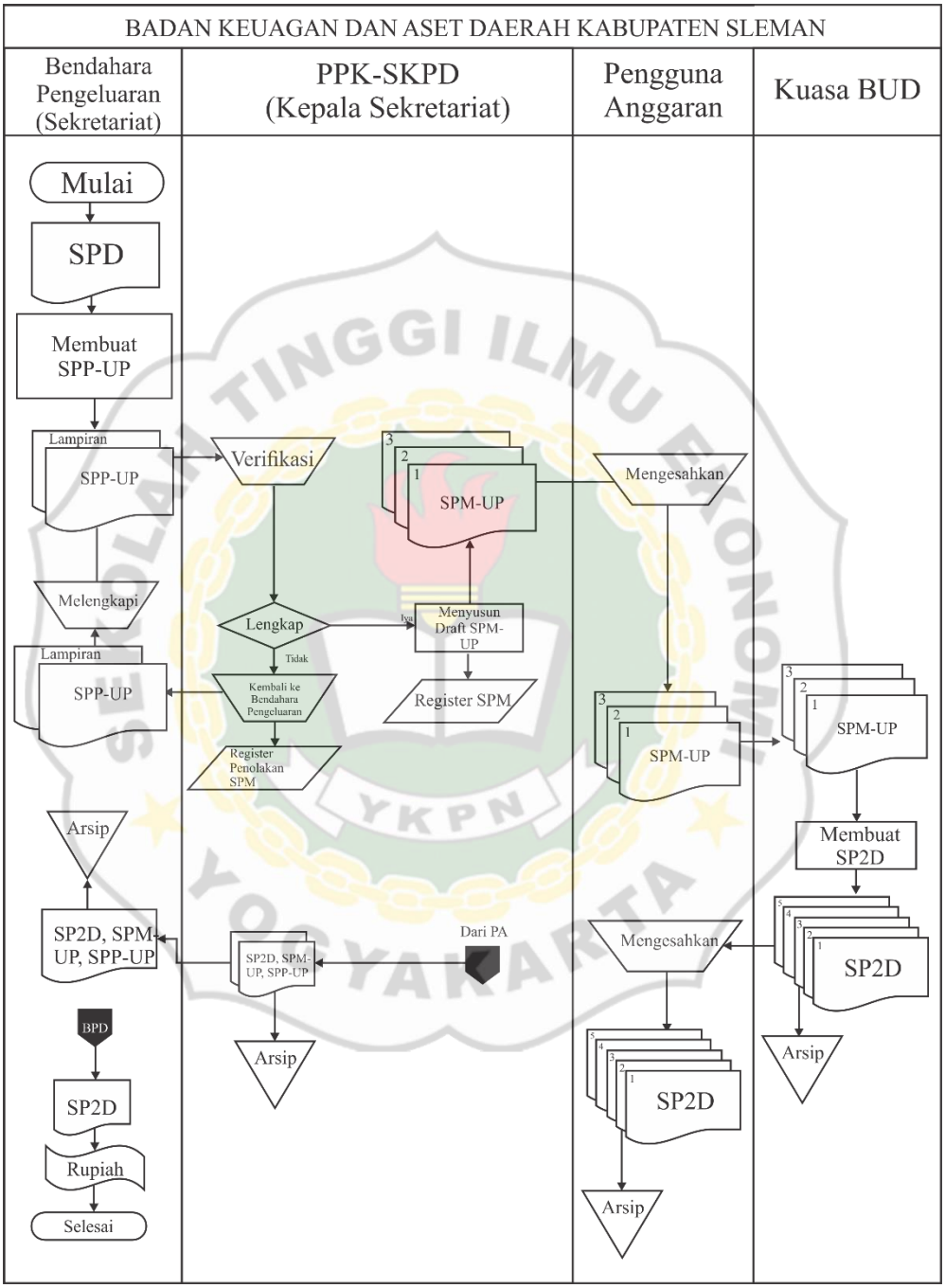

Gambar 1.4 Bagan Alir Prosedur Uang Persediaan (UP)
Sumber: Diolah Oleh Peneliti

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

c. Prosedur Ganti Uang

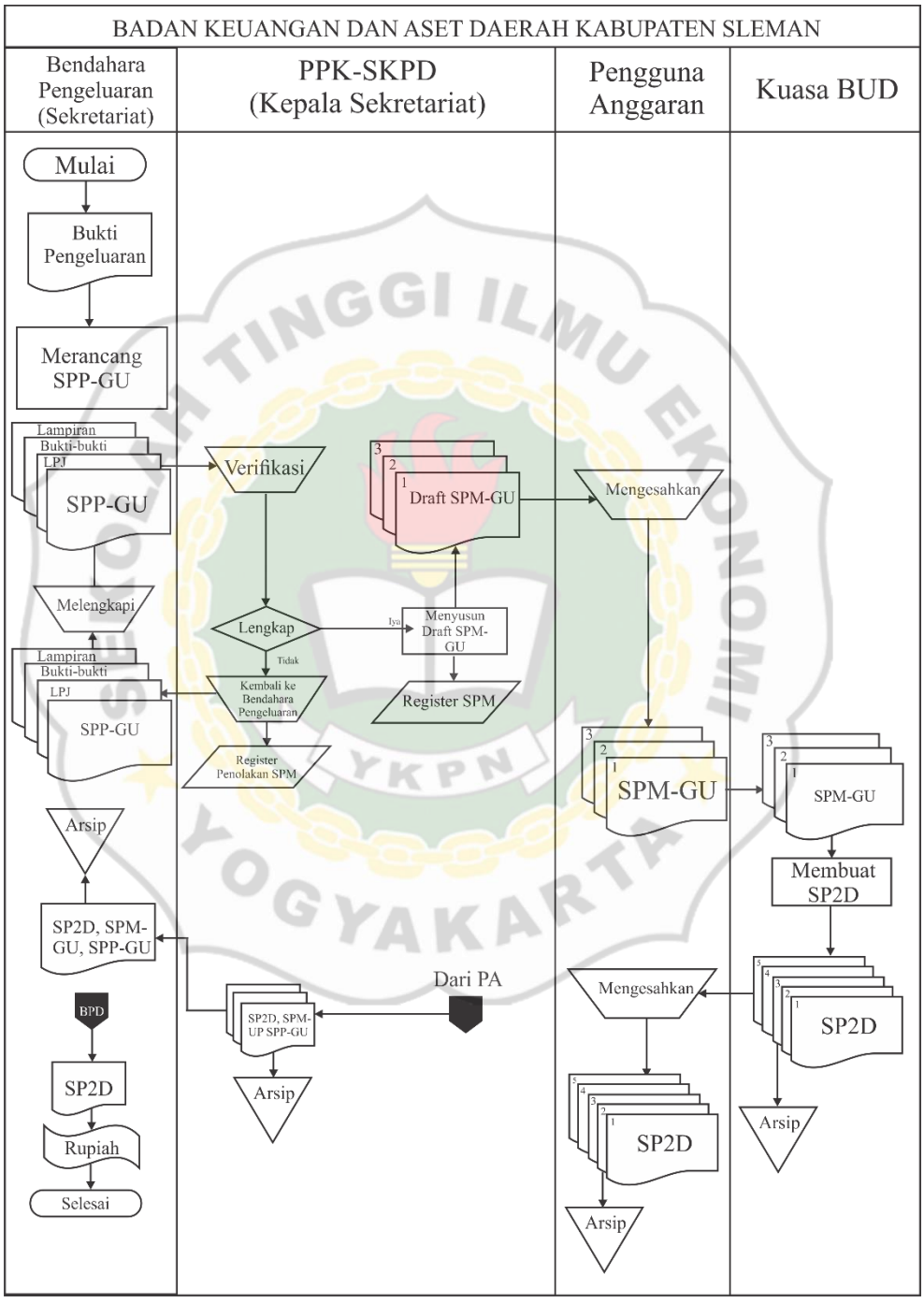

Gambar 1.5 Bagan Alir Prosedur Ganti Uang (GU)
Sumber: Diolah Oleh Peneliti

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

d. Prosedur Tambah Uang

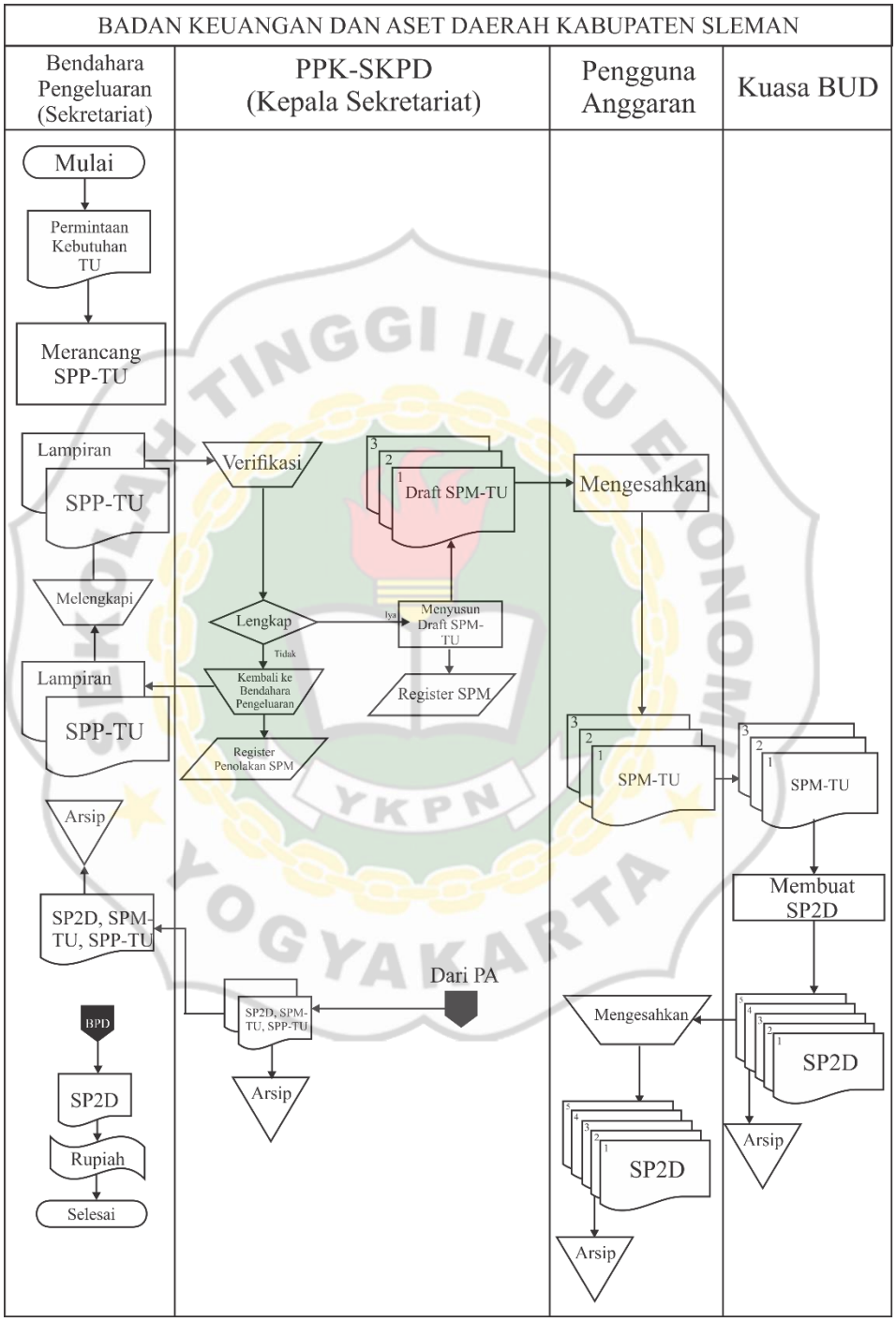

Gambar 1.6 Bagan Alir Prosedur Tambah Uang (TU)
Sumber: Diolah Oleh Peneliti

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

e. Prosedur Belanja Langsung

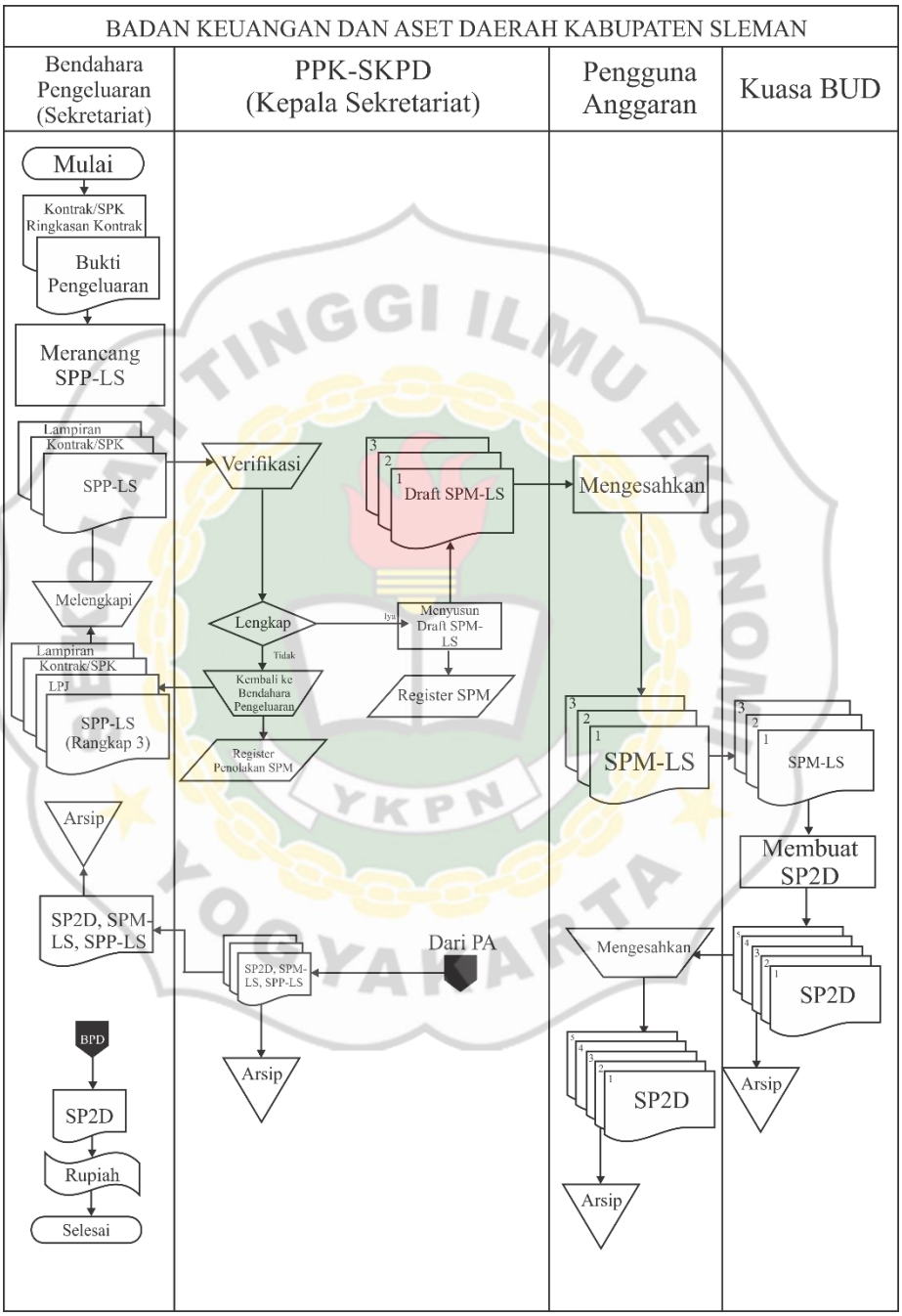

Gambar 1.7 Bagan Alir Prosedur Belanja Langsung (LS)
Sumber: Diolah Oleh Peneliti

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

a. Evaluasi Pelaksanaan Penerbitan Surat Penyedia Dana (SPD)

Surat Penyedia Dana (SPD) merupakan dokumen yang mengawali prosedur pengeluaran kas pada sebuah instansi. SPD memuat tentang tersedianya dana yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan SKPD pada periode tertentu. Prosedur penerbitan Surat Penyedia Dana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Sleman No 54.1 Tahun 2017, hal tersebut dikarenakan pihak yang berkaitan sudah menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya, seperti SPD diterbitkan oleh Kuasa BUD dan PPKD bertugas mengotorisasi SPD, selain itu dokumen yang digunakan juga sudah sesuai seperti yang sudah dijabarkan pada prosedur penerbitan SPD.

b. Evaluasi Pelaksanaan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SPP adalah dokumen yang dibuat oleh bendahara pengeluaran dan diserahkan kepada Pengguna Anggaran dalam rangka mengusulkan permintaan pembayaran untuk uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, maupun belanja langsung. Prosedur pengajuan SPP yang dilakukan di BKAD Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan peraturan yaitu Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 54.1 Tahun 2017. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pihak-pihak yang berkaitan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya, seperti: SPP dirancang dan diusulkan oleh bendahara pengeluaran, PPK-SKPD bertugas menerima SPP, melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen SPP, melakukan verifikasi pada bukti pengeluaran untuk pengajuan belanja langsung. Dokumen yang digunakan sudah sesuai dan lengkap, seperti surat pengantar, surat pernyataan, rincian, dan ringkasan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SPM merupakan dokumen yang diterbitkan sebagai dasar pembuatan SP2D. SPM diterbitkan apabila SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran dinyatakan memenuhi persyaratan dan tidak melebihi plafon yang ditentukan. Prosedur penerbitan SPM pada BKAD Kabupaten Sleman telah dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 54.1 Tahun 2017 dibuktikan dengan batasan jumlah permintaan UP/GU/TU tidak melebihi plafon yang sudah ditentukan, pihak yang berkaitan sudah mengerjakan tugas sesuai dengan kewenangannya seperti PPK-SKPD dalam proses penerbitan SPM bertugas untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen SPP yang diajukan, jika telah memenuhi syarat PPK-SKPD membuat rancangan SPM, pengguna anggaran bertugas untuk mengesahkan SPM dan surat penolakan SPM apabila SPP dianggap tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumen.

d. Evaluasi Pelaksanaan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

SP2D merupakan dokumen yang digunakan untuk mencairkan dana pada rekening kas umum daerah. SP2D diterbitkan berdasarkan SPM. Prosedur penerbitan SP2D pada BKAD Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 54.1 Tahun 2017. Hal tersebut dibuktikan dengan pihak terkait sudah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, seperti kuasa BUD yang berwenang menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang sudah dinyatakan lengkap dan telah disetujui oleh PPKD serta menerbitkan surat penolakan SP2D jika SPM dinyatakan belum lengkap.

e. Evaluasi Pengendalian Internal Berbasis Komputer Sistem Pengeluaran Kas di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 1.2
Evaluasi Pengendalian Internal di BKAD Kabupaten Sleman

Keterangan	Teori	BKAD Kabupaten Sleman	Penelitian
Pengendalian Internal	1. Analis dan Perancang Sistem harus dipisahkan untuk menghindari terjadinya pengubahan program atau data yang tidak sah. 2. Pemrograman Sistem, harus dilakukan dengan otorisasi formal. 3. Pengoperasian Sistem, operator komputer setidaknya dirotasi secara berkala dan tidak mempunyai akses terhadap dokumentasi program.	Analis, Perancang dan Pemrograman Sistem dilakukan oleh Pegawai Harian Lepas (PHL) Ahli, sedangkan Pengoperasian sistem dilakukan oleh bendahara masing-masing bidang.	Tidak terdapat pemisahan fungsi terkait dengan analis, perancang, pemrogram sistem. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan SDM yang ahli di bidang teknologi informasi. Selanjutnya pemrogram mensosialisasikan sistem yang dibuat kepada bendahara masing-masing bidang
	Pengguna Sistem, pihak yang mencatat, mengotorisasi dan menggunakan output hasil dari sistem.	Bendahara Pengeluaran, Pengguna Anggaran, PPK-SKPD	Tidak terjadi rangkap jabatan dalam pengguna, pencatat, pengotorisasi dan pengguna sistem
	Kepustakaan SIA	Tidak terdapat Kepustakaan SIA	Di BKAD tidak ada fungsi Kepustakaan SIA, program yang dirancang berupa aplikasi berbasis web yang dapat diakses di setiap
Pengawasan			

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keterangan	Teori	BKAD Kabupaten Sleman	Penelitian
			komputer, tidak diletakkan ditempat tersendiri
	Pengawas Data	Tidak terdapat pengawas data	Pihak yang bisa mengoperasikan sistem adalah pihak yang mempunyai user id dan password
	Backup Data	Data disimpan di internet	Aplikasi SIADINDA berbentuk sebuah website yang ada di internet.
	Pengawasan Fasilitas Komputer	Pusat pengolahan data tidak diletakkan di ruangan khusus	Pengelolaan Keuangan menggunakan aplikasi berbasis website yang bisa diakses di setiap komputer
	Akses File Komputer	Aplikasi SIADINDA terdapat user name dan password dan hanya dimiliki oleh pihak yang berwenang.	User Id dan Password dimiliki oleh setiap bendahara masing-masing bidang
	Pengamatan & Pencatatan Data	Pengamatan langsung bersamaan dengan input data	Tidak terdapat pengawasan khusus pada saat input data
	Pengubahan Data	Tampilan layer aplikasi SIADINDA mirip dengan format dokumen	Sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu merancang dokumen dan tampilan layer pada sistem

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keterangan	Teori	BKAD Kabupaten Sleman	Penelitian
Pengawasan Aplikasi			dengan format yang mirip agar meminimalisir kesalahan saat input data
	Pengujian Data Transaksi	Tidak terdapat peringatan pada field saat melakukan input data melebihi kisaran	Kurangnya pengendalian terhadap pengujian data transaksi
	Pengawasan Proses	Seluruh prosedur pengelolaan kas dilaksanakan dengan sistem komputerisasi menggunakan aplikasi SIADINDA	Tidak terdapat pengawasan khusus tentang pengolahan data, karena sudah terstruktur dengan sistem
	Pengawasan Output	Laporan yang hasilkan didistribusikan sesuai dengan penerimanya, akan tetapi tidak ada bukti tertulis tentang penerimaan laporan tersebut	Kurangnya Pengawasan Output mengenai pendistribusian laporan yang dihasilkan

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

KESIMPULAN

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman apakah sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No 21 Tahun 2011 dan Perbup Sleman No 54.1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem informasi akuntansi tersebut mencakup prosedur pengeluaran kas, pihak terkait, dokumen pengeluaran kas, dan pengendalian internal berbasis komputer. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu **Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas di BKAD Kabupaten Sleman yang dilaksanakan dengan aplikasi berbasis *website* yaitu Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) sudah berjalan sesuai dengan peraturan yaitu Permendagri No 21 Tahun 2011 dan Perbup Sleman No 54.1 Tahun 2017.** Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut:

a. Prosedur pengeluaran kas yang terdiri dari prosedur Uang Persediaan (UP), prosedur Ganti Uang (GU), prosedur Tambah Uang (TU), dan prosedur Belanja Langsung (LS) yang sudah dilaksanakan secara runtut dan semestinya seperti yang sudah dideskripsikan pada bab sebelumnya.
b. Dokumen yang digunakan di BKAD Kabupaten Sleman mulai dari penerbitan SPD, SPP, SPM dan SP2D sesuai dengan yang tertera pada Permendagri no 21 Tahun 2011 dan Perbub Sleman No 54.1 Tahun 2017, tidak ada yang dilebihkan ataupun dikurangi. Dokumen tersebut sudah dilampirkan dalam skripsi ini.
c. Pihak yang berkaitan dengan pengeluaran kas diantaranya bendahara pengeluaran, PPK-SKPD, Kuasa BUD, Pengguna anggaran, sudah melaksanakan tugasnya

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sesuai dengan kewenangannya seperti yang tertuang dalam peraturan dan tidak terjadi rangkap jabatan.

Di luar 3 unsur yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan antara teori dengan pengendalian internal berbasis komputer yang diterapkan di BKAD Kabupaten Sleman, yaitu kurangnya sistem pengendalian internal yang mengakibatkan terjadinya rangkap jabatan untuk analis, perancang dan pemrogram aplikasi, selain itu kurangnya pengawasan terhadap pengoperasian aplikasi. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor diantaranya kurangnya pegawai yang ahli dalam bidang teknologi informasi.

SARAN

a. Bagi BKAD Kabupaten Sleman, sebaiknya memperbaiki sistem pengendalian internal yang dapat dilakukan dengan cara menambah Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam bidang tekonologi informasi, untuk mengurangi terjadinya rangkap jabatan. Selain itu sebaiknya meningkatkan pelatihan dan sosialisasi penggunaan aplikasi SIADINDA sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja pada pengelolaan keuangan daerah dan mengurangi resiko kesalahan yang terjadi.
b. Bagi peneliti selanjutnya , sebaiknya memperbanyak sumber acuan tentang sistem informasi akuntansi pengeluaran kas daerah berbasis komputer, agar ketika membandingkan teori dengan penerapan tidak terjadi kesenjangan.

DAFTAR PUSTAKA

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

JAYANTI, R. (2020). *SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PEKANBARU* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011.

Peraturan Bupati Sleman No 54.1 Tahun 2017.

Bella Angelina Kasakeyan, H. K. (2020). EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS BELANJA. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 15(3), 2020, 352-359, 3*, 352-359.

Clarissa Bellinda Rondonuwu, V. I. (2020). ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MANADO. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 15(3), 2020, 316-323, 3*, 316-323.

Daerah, B. K. (2020). *BKAD Ksbupaten Sleman.* Retrieved Desember 15, 2020, from bkad slemankab: https://bkad.slemankab.go.id/pejabat-dan-pegawai/

Gracella Claudia Rondonuwu, J. M. (2018). ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3), 2018, 436-444, 3*, 436-444.

Krismiaji. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi* (Vol. 3). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Mahend, B. (2014, november 25). *sistem pengeluaran kas*. Retrieved Desember 25, 2020, from kementerian dalam negeri republik indonesia: http://info-pemda.blogspot.com/2014/11/sistim-pengeluaran-kas.html

Mahend, B. (2014, November 2014). *Uang Persediaan*. Retrieved Oktober 20, 2020, from Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia: http://info-pemda.blogspot.com/2014/11/uang-persediaan.html

RI, S. W. (2017, Desember 27). *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Retrieved Desember 19, 2020, from JDIH BPK RI Database Peraturan: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/91781/perbup-kab-sleman-no-541-tahun-2017

Sampoel Johanes Nofry, J. J. (2019). ANALISIS EFEKTIFITAS SISTEM PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MINAHASA. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi14(4), 2019, 440-445, 4*, 440-445.

Winarno, W. W. (2006). *Sistem Informasi Akuntansi* (Vol. 2). Yogyakarta: UPP STTM YKPN.

Zohri, L. (2014, september 11). *Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan daerah dengan kualitas informasi laporan keuangan sebagai variabel intervening pada pemerintah daerah kabupaten lombok timur*. Retrieved

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

November 22, 2020, from slideshare.net: https://www.slideshare.net/lailatulzohri/proposal-zohri-terbaru

repository.stieykpn.ac.id